

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Banulita, M. 2023. Asas Penuntutan Tunggal. Jakarta: Guepedia.
- Chazawi, A. 2017. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. 2019. Terminology Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, K., Husin, B., K. 2016. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, J, A. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Iswara, I., M., A., M., Iswara, A., A. 2023. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mekanisme Mediasi Penal. Indramayu: CV Adanu Abimata.
- Khaleed, B. 2015. Penyelesaian Hukum KDRT. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Krismen, Y. 2021. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Kaligis, C, O. 2006. Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberatan Korupsi, Bandung: P.T. Alumni.
- Marzuki, M, P. 2005. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Poeromo, B. 1992. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahim, M., I., F. 2023. Asas-asas Hukum Penuntutan. Jakarta: guepedia.
- Rusianto, A. 2016. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana.
- Rahim, M, I, F. 2022. Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi). Makasar: Humanities Genius.
- Sastrawidjaja, S. 1990. Hukum Pidana I. Bandung: Armico.
- Sianturi, S. R. 2002. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan. Jakarta: Storia Grafika.

Sofyan, A., Azisa, N. 2015. Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Press.

Sudewo, F., A. 2021. Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhad dengan Hukum. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.

Surodibroto, S. 2006. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wibowo, K., T., Utaminingrum, E., G., Y. 2022. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

JURNAL

Artadinata, N., Lasmadi, S. (2023). Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. 4(3).

Djafar, M., dkk. (2022) “Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*. 9(4).

Hidayatullah, S., dkk., (2023). Analisis Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 29(2).

Mukhtar, A., dkk., (2022). Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal of Lex Generalis*, 3(4).

Pane, D. (2023). “Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Restorative Justice”, *Indonesia Berdaya*. 4(4).

Setiawan, N. S., dkk., (2023). Pemahaman Dan Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3).

Sihombing, D. C., dkk. (2023). “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif”, *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. 3(2).

WEBSITE/ INTERNET

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2024.

Kejarilabuhanbatu. Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Hentikan Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atas Nama Tersangka Pendi Sianturi, <https://kejari-labuhanbatu.go.id/kejaksaan-negeri-labuhanbatu-hentikan-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif-perkara-kekerasan-dalam-rumah-tangga-atas-nama-tersangka-pendi-sianturi/>, diakses pada tanggal 18 Juli 2025.

Oktavira, B., A. Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2024.

Website Resmi Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, <https://kejari-labuhanbatu.kejaksaan.go.id/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.